

**Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Papua Barat
013.06.3300 UAKPA W - E 1
AUDITED**

Untuk Periode 14 yang Berakhir
31 Desember 2023

Jln. Brigjend (purn). Abraham O.Atururi
Kel. Andai-Arfai II, Manokwari
Papua Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Manokwari, 13 Mei 2024
Kepala Kantor Wilayah


Piet Bukorsyom

NIP.196512271996101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	02
Daftar Isi	03
Pernyataan Tanggung Jawab	04
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	07
Neraca	08
Laporan Operasional	09
Laporan Perubahan Ekuitas	10
Catatan atas Laporan Keuangan		
A. Penjelasan Umum	11-26
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27-37
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	38-54
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	55-62
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	63-69
F. Pengungkapan Penting Lainnya	70
Lampiran dan Daftar		

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

*Jln. Brigjend (purn). Abraham O.Atururi
Kel. Andai-Arfai II, Manokwari, Papua Barat
Telepon (0986) 2210253, Faksimile (0986) 2210254*

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat wilayah selaku UAPPA-W Audited yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Manokwari, 13 Mei 2024

Kepala Kantor Wilayah



Piet Bukorsyom

NIP.196512271996101001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, PMK No. 222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL, Surat Dirjen Perbendaharaan No. S-32/PB/PB.6/2022 tanggal 10-8-2022 04 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat UAKPA dan KPPN Periode Semester II Tahun 2023 dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 5.411.333.679,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2022 adalah sebesar Rp 23.550.271.813,- atau mencapai 98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 23.971.283.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 58.276.358.964,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 870.364.764,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 58.856.523.485,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 549.470.715-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 57.684.646- dan Rp

58.276.358.964,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.380.620.879,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 21.900.225.954,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp (16.519.605.075),- Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 22.012.800,- dan Rp (16.497.592.275),- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (16.497.592.275).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 55.917.876.640,- ditambah DefisitLO sebesar Rp (16.497.592.275) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. (231.588.653),- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp 19.029.978.606,kenaikan / penurunan ekuitas adalah senilai 2.300.797.678,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 58.218.674.318,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2022 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara B	B.1	3.894.900.000	5.411.333.679	138,93	4.594.590.898
JUMLAH PENDAPATAN		3.894.900.000	5.411.333.679	138,93	4.594.590.898
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	5.541.219.000	5.505.684.138	99,36	5.349.569.192
Belanja Barang	B.4	13.535.869.000	13.198.689.395	97,51	11.477.451.747
Belanja Modal	B.5	4.894.195.000	4.845.898.280	99,01	1.584.586.083
Belanja Bantuan Sos	B.6			#DIV/0!	
JUMLAH BELANJA		23.971.283.000	23.550.271.813	98,24	18.411.607.022

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
NERACA**

PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	870.364.764	835.941.393
Jumlah Aset Lancar		870.364.764	835.941.393
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	26.692.422.000	26.692.422.000
Peralatan dan Mesin	C.15	15.872.508.311	14.194.754.258
Gedung dan Bangunan	C.16	31.557.272.781	28.336.714.501
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	58.928.000	58.928.000
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(17.324.607.607)	(14.908.487.186)
Aset Tetap yang belum diregister	C.21	-	-
Jumlah Aset Tetap		56.856.523.485	54.374.331.573
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.22	29.256.534	28.878.751
Aset Lain-Lain	C.23	3.266.073.511	3.427.697.634
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24	(2.745.859.330)	(2.723.948.765)
Jumlah Aset Lainnya		549.470.715	732.627.620
JUMLAH ASET		58.276.358.964	55.942.900.586
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.25	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.26	48.984.646	25.023.946
Pendapatan Diterima di Muka	C.27	8.700.000	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.28	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.29	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.30	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		57.684.646	25.023.946
JUMLAH KEWAJIBAN		57.684.646	25.023.946
EKUITAS			
Ekuitas	C.31	58.218.674.318	55.917.876.640
JUMLAH EKUITAS		58.218.674.318	55.917.876.640
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		58.276.358.964	55.942.900.586

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2023 dan 31 Desember
2022 – AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.380.620.879	4.521.422.694
JUMLAH PENDAPATAN		5.380.620.879	4.521.422.694
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	5.507.303.138	5.335.884.192
Beban Persediaan	D.3	1.247.986.039	980.052.214
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.497.787.179	6.335.251.987
Beban Pemeliharaan	D.5	1.009.922.846	852.924.388
Beban Perjalanan	D.6	5.236.891.360	3.730.634.986
Beban Barang untuk Disposal	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	2.400.335.392	2.367.070.420
Beban Penyisihan	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		21.900.225.954	19.601.818.187
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(16.519.605.075)	(15.080.395.493)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Non Operasional		510.000	40.710.000
Defisit Penjualan Aset Non Operasional		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional		21.502.800	32.458.204
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		21.502.800	32.458.204
Beban dari Kegiatan Non Operasional		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		22.012.800	73.168.204
		(16.497.592.275)	(15.007.227.289)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(16.497.592.275)	(15.007.227.289)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 - AUDITED

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	55.917.876.640	56.456.875.928
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(16.497.592.275)	(15.007.227.289)
KOREKSI YANG	E.3	(231.588.653)	(18.515.023)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	E.3.1	-	-
MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
REVALUASI	E.3.5	(231.588.653)	(18.515.023)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	19.029.978.606	14.486.743.024
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		2.300.797.678	(538.999.288)
EKUITAS AKHIR	E.5	58.218.674.318	55.917.876.640

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Dasar Hukum

Entitas dan

Rencana Strategis

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, berkedudukan di Provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitas perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;

5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Keimigrasian :

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
4. Pengekoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari :

1. Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian; dan
2. Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang Intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2022 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor

Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM Papua Barat untuk bagian Keimigrasian adalah 3 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wilayah	Satker	Jumlah/Jenis Kewenangan				Jumlah Satker
			KP	KD	DK	TP	
1	3300	Divisi Keimigrasian	-	1	-	-	1
2	3300	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	-	1	-	-	1
3	3300	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	-	1	-	-	1
Jumlah			-	3	-	-	3

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya

telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

□Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

□Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

□Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak

berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

□Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

□Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian Nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

□Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

□Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

□Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset

Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

<i>Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap</i> <i>Kelompok Aset Tetap</i>	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang

Jangka

Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Selama periode berjalan di Semester II Tahun 2023 ini Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat pernah mengadakan revisi mengadakan revisi sebanyak 5 Kali dengan DIPA-013.06.2.667775/2023/Revisi Ke 01 tanggal 15 Februari 2023 ; DIPA-013.06.2.667775/2023/REVISI KE 2 tanggal 15 April 2023 ;DIPA-13.06.2/667775/203/REVISI KE 03 tanggal 14 juli 2023 ; DIPA-13.06.2/667775/2023/REVISI KE 04 tanggal 10 Oktober 2023; DIPA-13.06.2/667775/2023/REVISI Ke 05 Tanggal 27 Desember 2023 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
2. Selama periode berjalan, *KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI MANOKWARI* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan..
3. Selama periode berjalan, *Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong* sudah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal .

Realisasi

Pendapatan

Rp

5.411.333.679,-

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 5.411.333.679,- atau mencapai 139 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 0. Pendapatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat khususnya di bidang keimigrasian berasal dari Pendapatan dari Pengelolaan BMN (pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan), pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, dan

urusan (pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan), dan pendapatan lain-lain.

Realisasi pendapatan dapat dilihat sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari pengelolaan BMN	-	-	#DIV/0!
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	-	-	
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	-	-	
Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	-	-	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.894.900.000	5.411.333.679	138,93
Jumlah	3.894.900.000	5.411.333.679	138,93

Realisasi Pendapatan TA 2023 tidak terdapat peningkatan realisasi TA 2022. Hal ini disebabkan karena pendapatan pada TA 2022 terdapat tambahan pendapatan dari Pengelolaan BMN berupa penjualan peralatan dan mesin serta pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya yang terlaksana di TA 2022.

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-	38.610.000	-100,00
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	510.000	2.100.000	-75,71
Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan	14.696.700	15.922.694	-7,70
Pendapatan Paspor	3.226.700.000	1.528.100.000	111,16
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.836.800.000	2.833.400.000	-35,17
Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	242.900.000	126.000.000	92,78
Pendapatan Penyelesain Ganti Kerugian Negara	6.224.179	-	#DIV/0!
Penerimaan Kembali belanja pegawai TYAL	80	204	-60,78
Penerimaan kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	21.502.720		
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	32.458.000	-100,00
Pendapatan Visa	62.000.000	18.000.000	244,44
Jumlah	5.411.333.679	4.594.590.898	17,78

Realisasi
 Belanja Negara
 Rp. 23.550.271.813

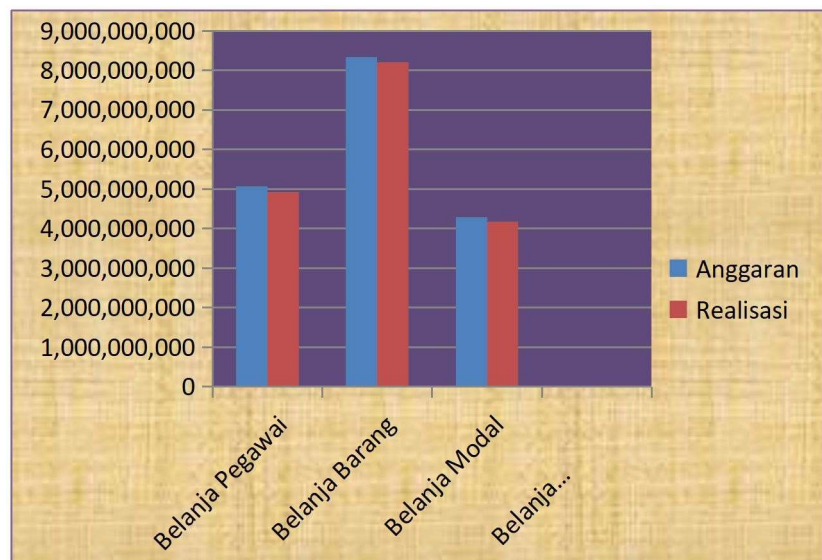
B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah sebesar Rp 23.550.271.813,- atau 98% dari anggaran belanja sebesar Rp , - 23.971.283.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 tersaji sebagai berikut:

Realisasi Belanja TA 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5.541.219.000	5.505.684.138	99,36
Belanja Barang	13.535.869.000	13.198.689.395	97,51
Belanja Modal	4.894.195.000	4.845.898.280	99,01
Belanja Bantuan Sosial	0	0	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	23.971.283.000	23.550.271.813	98,24
Pengembalian Belanja	-	-	#DIV/0!
Total Belanja	23.971.283.000	23.550.271.813	98,24

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 3% dibandingkan realisasi belanja pada TA 2022. Hal ini

disebabkan di Tahun 2023 ada Kenaikan KGB dan Kenaikan Pangkat sehingga belanja pegawai mengalami peningkatan dan di TA 2023 juga ada peningkatan belanja barang guna mendukung kinerja dan rencana strategis yang dimulai pada TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	5.505.684.138	5.349.569.192	2,92
Belanja Barang	13.198.689.395	11.477.451.747	15,00
Belanja Modal	4.845.898.280	1.584.586.083	205,81
Belanja Bantuan Sosi	-	-	#DIV/0!
Jumlah	23.550.271.813	18.411.607.022	27,91

Belanja Pegawai **B.3 Belanja Pegawai**

Rp.
5.505.684.138,-

Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.505.684.138,- dan Rp 5.349.569.192,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Berdasarkan tabel perbandingan belanja pegawai, realisasi belanja TA 2023 mengalami peningkatan sebesar 1 persen dari realisasi belanja TA 2022. Hal ini disebabkan di TA 2023 adanya kenaikan gaji berkala dan Kenaikan Pangkat pegawai,

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5.490.877.138	5.339.887.192	2,83
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	#DIV/0!
Belanja Honorarium	0	0	#DIV/0!
Belanja Lembur	14.807.000	9.682.000	52,93
Belanja Vakasi	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	5.505.684.138	5.349.569.192	2,92
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja	5.505.684.138	5.349.569.192	2,92

Belanja Barang B.4 Belanja Barang

Rp.

Realisasi Belanja Barang TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 13.198.689.395,- dan Rp 11.477.451.747,-

Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 15% dari Realisasi Belanja Barang TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan adanya peningkatan dalam belanja perjalanan dalam negeri, belanja barang operasional, belanja barang non operasional, dan belanja barang persediaan guna kelancaran dalam mencapai kinerja yang maksimal.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang O	1.351.781.535	1.588.434.314	(14,90)
Belanja Barang Non Operasional	3.466.055.426	3.087.183.816	12,27
Belanja Barang Persediaan	448.395.460	588.848.732	(23,85)
Belanja Jasa	1.657.608.518	1.602.275.311	3,45
Belanja Pemelihar	1.037.957.096	880.074.588	17,94
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	5.236.891.360	3.730.634.986	40,38
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja k	13.198.689.395	11.477.451.747	15,00
Pengembalian Bel	-	-	
Jumlah Belanja	13.198.689.395	11.477.451.747	15,00

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp.

4.845.898.280,- Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp.4.845.898.280 ,- dan Rp. 1.584.586.083,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami Kenaikan sebesar 13% dibandingkan TA 2022 disebabkan pada TA 2022 belum terrealisasinya pembangunan gedung di Kanim Manokwari dan pembelian peralatan dan mesin dan akan di realisasikan pada semester II Tahun 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja modal Peralatan dan Mesin	1.640.340.000	766.545.028	113,99
Belanja modal Gedung dan Bangunan	1.193.414.200	0	#DIV/0!
Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	2.012.144.080	818.041.055	145,97
Jumlah Belanja Kotor	4.845.898.280	1.584.586.083	205,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	4.845.898.280	1.584.586.083	205,81

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal tanah TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah

TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	#DIV/0!
Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	
Pengurusan dan Pematangan Tanah	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 adalah sebesar Rp. 1.640.340.000,- mengalami Kenaikan dibandingkan dengan TA 2022 yaitu sebesar 113.99%. Hal ini disebabkan karena di TA 2022 belanja modal terdapat pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Kanim Kelas II TPI Sorong telah terealisasi pada semester II Tahun 2023 ini.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mes	1.640.340.000	766.545.028	113,99
Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Pemasangan Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	1.640.340.000	766.545.028	113,99
Pengembalian	0	0	0,00
Jumlah Belanja	1.640.340.000	766.545.028	113,99

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 3.205.558.280,- dan Rp. 818.041.055,-. Pada TA 2022 belanja modal gedung dan bangunan mengalami Penurunan sebesar -338,85% dibanding TA 2022 dikarenakan pada TA 2022 hanya terdapat renovasi genteng gedung Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari yang telah ter realisasi di semester II Tahun 2023 .

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA
2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Ba	3.205.558.280	818.041.055	74,48
Belanja Modal Upah dan Honor Pengelola Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	3.205.558.280	818.041.055	74,48
Pengembalian Belanja Modal	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja	3.205.558.280	818.041.055	74,48

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0. Pada TA 2023 dan TA 2022 tidak ada belanja modal untuk jalan, irigasi, maupun jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
TA 2023 dan 2022*

RAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A 2022	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian Belanja M	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

Belanja

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Bantuan Sosial

Rp 0

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial
TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Penerima Bantuan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	0	0	#DIV/0!
Penerima Bantuan melalui Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	0	0	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor	0	0	#DIV/0!
Pengembalian	0	0	
Jumlah Belanja	0	0	#DIV/0!

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-*

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Saldo BP Kas	-	-
Saldo BP BPP	-	-
Saldo BP uang muka	-	-
Kuitansi yang belum di SP2D kan	-	-
Jumlah	-	-

*Kas di
Bendahara*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

masing-masing Rp 0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran layanan keimigrasian telah dilaksanakan secara terpusat melalui Bank persepsi dengan menggunakan aplikasi SIMPONI sehingga satuan kerja sudah tidak menerima lagi PNBPN.

*Penerimaan dan
Setar Kas Rp. 0*

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

T
A
2

*Tabel Kas di Bendahara
Penerima Tahun 2023 dan
2022*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

T

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari Hibah	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNB

Rp 0

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2023 dan 2022

Uraian	THN 2023	THN 2022
Piutang PNBP	-	
Piutang Lainnya		
Jumlah	-	-

*Bagian Lancar
TP/TGR
Rp 0.-*

**C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/
Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp 0. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2023 dan 2022

No	Debitur per Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	-	-
2	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	-	-
Jumlah		-	-

*Bagian Lancar
TPA Rp 0*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA TA 2023 dan 2022

No	Debitur per Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Satker Kanwil Kemenkumham Papua Barat	-	-
2	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	-	-
3	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –Piutang
Lancar
Rp. 0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp 0. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang lancar adalah merupakan estimasi atas

ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar TA 2023

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka **C.8 Belanja Dibayar di Muka**

Muka

Rp 0,-

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Beban Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Dibayar di Muka TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pembayaran Internet		
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin		
Pembayaran Sewa Mobil	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor		
Jumlah	-	-

Pendapatan yang

Masih Harus

Diterima Rp 0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum disampaikan tagihannya. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima TA 2023 dan 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang Bukan Pajak Rp. 0,-

C.10 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing - masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan /klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah di berikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per taggal neraca. Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan / surat tagihan.

Rincian Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis	TH 2023	TH 2022
Piutang Bukan Pajak	-	-
Jumlah	-	-

Persediaan Rp. 870.364.764,-

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 870.364.764,- dan Rp 835.941.393 ,,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 da 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

Persediaan	TH 2023	TH 2022
Barang Konsumsi	861.967.764	649.803.097
Bahan untuk Pemeliharaan	8.397.000	7.007.000
Bahan baku	-	-
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga		-
Pita Cukai, Materai dan Leges	-	640.000
Persediaan Lainnya	-	178.491.296
Jumlah	870.364.764	835.941.393

Semua Jenis persediaan pada tanggal pelaporan dalam kondisi baik

Tagihan TP/TGR
Rp 0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti

Rugi (TP/TGR) TA 2023 dan 2022

No	Debitur per Satker	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Muhammad Akmal (Pegawai Divisi Keimigrasian)	-	-
2	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	-	-
3	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	-	-
Jumlah		-	-

*Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp 0*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian TPA untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

No	Debitur	Tahun 2023	Tahun 2022
1	Divisi Keimigrasian	-	-
2	Kantor Imigrasi Kelas II Manokwari	-	-
3	Kantor Imigrasi Kelas II Sorong	-	-
Jumlah		-	-

*Penyisihan
Piutang Tak*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

*Tertagih –Piutang
Jangka Panjang
Rp 0*

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Penyisihan

Piutang tak tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang tak Tertagih Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka
Panjang TA 2023*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Tanah

C.14 Tanah

Rp 26.692.422.000 Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 26.692.422.000,- dan Rp 26.692.422.000,- . Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	26.692.422.000
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
Hibah	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2023	Rp	26.692.422.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2022	Rp	26.692.422.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah TA 2023

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	5.574 m2	Jl. Brigjen Marinir Abraham O. Atururi Arfai li Manokwari	14,533,053,000
2		Jln. Masjid Raya, HBM Sorong	12,159,369,000
4			
Jumlah			26,692,422,000

Peralatan dan

Mesin

Rp.

15.872.508.311,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 15.872.508.311,- dan Rp 14.194.754.258,-. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	Rp 14.194.754.258
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp 1.078.540.000
Hibah Barang	Rp -
Transfer Masuk	Rp 396.381.030
Perolehan Lainnya	Rp 562.000.000
Reklasifikasi Masuk	Rp 2.000.000
Mutasi kurang:	
transfer Keluar	Rp 281.470.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	Rp 77.496.977
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Rp 200.000
Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya	Rp -
Reklasifikasi Keluar	Rp 2.000.000
Saldo per 31 Desember 2023	Rp 15.872.508.311
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2023	Rp -
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp 15.872.508.311

Mutasi Tambah :

- a. Pembelian peralatan dan mesin pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong;
- b. Terdapat Pembelian Peralatan dan Mesin, Reklasifikasi Keluar, Reklasifikasi Masuk serta penghentian asset dari penggunaan kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sorong sebesar Rp 7.376.506.941;

- c. Terdapat Koreksi Pencatatan Berkurang Nilai Berkurang, Pembelian, Perolehan Lainnya serta Transfer Masuk peralatan dan mesin dari Direktorat Jenderal Imigrasi kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari sebesar Rp 8.496.001.370,-.

Mutasi Kurang :

- a. Terdapat reklasifikasi dari aset tetap ke aset lainnya pada Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari sebesar Rp. 2.000.000,-.

*Gedung dan
Bangunan
Rp.
31.557.272.781,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 31.557.272.781,- dan Rp 28.336.714.501. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2022	28.336.714.501
Mutasi tambah:	-
Pembangunan Gedung	694.020.000
Koreksi Nilai Bertambah	28.042.800
Mutasi kurang:	
koreksi pencatatan	(694.020.000)
Pengembangan Melalui KDP	2.170.333.680
koreksi susulan	1.022.181.800
Koreksi Susulan	733.622.464
Koreksi pencatatan nilai berkurang	(733.622.464)
Saldo per 31 Desember 2022	31.557.272.781
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2022	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	31.557.272.781

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Desember 2022	-
Mutasi tambah:	
Pengembangan Jaringan Teknologi Informasi	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2023	-
nilai buku per 31 Desember 2023	-

Aset Tetap Lainnya Rp 58.928.000,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 58.928.000,- dan Rp 58.928.000,-. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Per 31 Desember 2022	58.928.000
Mutasi tambah:	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	
Koreksi pencatatan	-
Saldo per 31 Desember 2022	58.928.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	58.928.000

Konstruksi dalam Pengerjaan **C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Pengerjaan

Rp 0,-

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Pada Semester II TA 2023 tidak terdapat KDP (Konstruksi Dalam Pengerjaan) pada satuan kerja.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	No Kontrak	Nilai Kontrak	%	KDP	Ket
1		-		0	
2				0	
Jumlah		-		-	

Akumulasi

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset

Tetap

Rp.

(17.324.607.607)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp (17.324.607.607,-) dan Rp.(14.908.487.186,-) Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mes	Rp 15.872.508.311	Rp (12.452.800.980)	Rp 28.325.309.291
2	Tanah	Rp -	Rp -	Rp -
3	Gedung dan Bangunan	Rp 31.557.272.781	Rp (4.871.806.627)	Rp 36.429.079.408
4	Aset tetap renovasi	Rp -	Rp -	Rp -
5	KDP	Rp -		Rp -
6	Aset Tetap Lainnya	Rp 58.928.000	Rp -	Rp 58.928.000
Akumulasi Penyusutan		Rp 47.429.781.092	Rp (17.324.607.607)	Rp 64.813.316.699

*Aset Tetap yang
Belum Diregister
Rp. 0,-*

C.21 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing Rp. 0,dan Rp. 0

*Aset Tak
Berwujud
Rp 29.256.534,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 29.256.534,- dan Rp 28.878.751 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software Komputer	29.256.534
ATB Lainnya	0
	29.256.534

Mutasi:

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	-
Mutasi tambah:		
koreksi catat	Rp	-
Transfer Masuk	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	-
Amortisasi	Rp	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	Rp	-

*Aset Lain-Lain
Rp 3.266.073.511,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 3.266.073.511,- dan Rp 3.427.697.634,- Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan

Saldo per 31 Desember 2022	Rp	3.427.697.634
Mutasi tambah:		
- reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
Mutasi kurang:		
- penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
- penghapusan BMN	Rp	161.624.123
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	3.266.073.511
Akumulasi Penyusutan	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2023	Rp	3.266.073.511

tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat serta dalam proses penghapusan dari BMN. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya C.23 **Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Amortisasi Aset

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Lainnya

Rp. (2.745.859.330,-)

per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. (2.745.859.330) dan Rp (2.723.948.765). Rincian akumulasi amortisasi dan penyusutan aset lainnya adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Software	0	2.647.102.796	0
ATB Lainnya	0	29.256.534	0
Aset Lain-lain	0	69.500.000	0
Jumlah	0	2.745.859.330	0

Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset Lainnya

Uang Muka dari
KPPN
Rp 0,-

C.24 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN untuk masing-masing Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat untuk bagian keimigrasian adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Uang Muka dari KPPN

No	Uraian	Tahun 2023
1	Divisi Keimigrasian	-
2	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	-
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	-
Jumlah		-

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp.
48.984.646,-

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 48.984.646,- dan Rp. 25.023.946,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja pegawai yang masih harus dibayar serta barang yang masih harus

dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Jasa Giro yang belum disetor	Rp -
2	Potongan Pajak yang belum disetor	Rp -
4	Utang kepada Pihak Lainnya	Rp 48.984.646
Total		Rp 48.984.646

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp 8.700.000,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 8.700.000 dan Rp. 0 Pendapatan Bukan Pajak Diterima di Muka merupakan pendapatan PNBП Paspор pada Kanim Kelas II TPI Sorong yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBП. Rincian Pendapatan Diterima di Muka dari pihak ketiga disajikan sebagai berikut:

Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Badan Swasta		
Instansi Pemerintah Lainnya	8.700.000	PNBP Papor yang sudah di setor ke KAS Negara dan sudah dilakukan penjurnalan
Badan Lainnya		
Total	8.700.000	

Beban yang Masih harus Dibayar Rp 0

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut :

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar
TA 2023 dan TA 2022*

Keterangan	TH 2023	TH 2022
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		
Jumlah	-	-

Ekuitas Rp 58.218.674.318,-

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 58.218.674.318,- dan Rp 55.917.876.640,-. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C.29 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum di Tagihkan Rp 0

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023

dan 31 Desember 2022 adalah masing - masing sebesar Rp.0,- dan Rp. 0,-. Utang yang belum di tagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena ada pencatatan Kwitansi atau BAST dari pihak ke tiga yang belum diajukan pembayarannya sampai dengan pelaporan Keuangan ini.

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan menurut Satuan Kerja
Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	Tahun 2023
1	Divisi Keimigrasian	-
2	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Manokwari	-
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	-
Jumlah		-

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp
5.380.620.879,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 5.380.620.879,- dan Rp 4.521.422.694,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pengelolaan BMN	5.380.620.879	4.521.422.694	19,00
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN dan iuaran badan	-	-	
Pendapatan Jasa	-	-	
Jumlah	5.380.620.879	4.521.422.694	19,00

Pendapatan Jasa merupakan Pendapatan-LO yang diperoleh dari pelayanan keimigrasian seperti penerbitan paspor dan izin tinggal, namun di TA 2023 sudah tidak terdapat pendapatan Jasa yang berasal dari Pendapatan surat keterangan, visa, paspor dikarenakan pembayarannya sudah terpusat dan tidak melalui unit satuan kerja.

Beban Pegawai **D.2 Beban Pegawai**

Rp 5.507.303.138,-

Jumlah Beban Pegawai pada TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.507.303.138,- dan Rp. 5.335.884.192,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	3.599.552.838	3.471.294.011	4
tunjangan	1.325.887.960	1.238.536.181	7
Beban Uang Makan	567.055.340	616.372.000	-8
Beban Honorarium dan V	-	-	#DIV/0!
Beban	-	-	
Beban Lembur	14.807.000	9.682.000	53
Jumlah	5.507.303.138	5.335.884.192	3

Beban Persediaan **D.3 Beban Persediaan**

Rp 1.247.986.039,-

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.247.986.039,- dan Rp. 980.052.214,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.247.986.039	980.052.214	27
Beban Persediaan -Penanganan Pandemi C	-	-	-100
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	-	-	-100
beban persediaan amunisi	-	-	
Beban Persediaan Lainnya		-	#DIV/0!
Jumlah	1.247.986.039	980.052.214	27

*Beban Barang dan
Jasa
Rp 6.497.787.179,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 6.497.787.179,- dan Rp.

6.335.251.987,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023 dan
2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
beban keperluan perkantoran	1.025.950.227	1.071.804.952	-4,28
beban penambah daya tahan tubuh	2.520.000	18.208.600	-86,16
beban Operasional lainnya -Penangan	60.560.400	203.174.762	
beban honor operasional satker	219.320.000	187.720.000	16,83
beban barang operasional lainnya	49.022.800	104.300.000	-53,00
beban bahan	683.027.026	731.072.349	-6,57
beban honor output kegiatan	86.820.000	85.650.000	1,37
beban barang non operasional lainnya	2.696.208.400	2.270.461.467	18,75
beban Barang Persediaan Lainnya -Pe	0		#DIV/0!
Beban Persediaan barang konsumsi	0	49.527.100	-100,00
beban langganan listrik	313.924.469	269.082.352	16,66
beban langganan telepon	546.644	623.135	-12,28
beban langganan air	7.629.666	9.550.120	-20,11
beban langganan daya dan jasa lainnya	0		#DIV/0!
beban pengiriman surat dinas pos pusa	1.905.000	1.820.500	4,64
Beban jasa Pos dan Giro	0		#DIV/0!
beban sewa	1.289.127.547	1.249.785.150	3,15
beban jasa profesi	21.900.000	5.400.000	305,56
beban jasa lainnya	39.325.000	29.650.000	32,63
beban jasa - Penanganan Pandemi Cov	0	47.421.500	-100,00
beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	#DIV/0!
dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Jumlah	6.497.787.179	6.335.251.987	2,57

LO

Beban

Pemeliharaan

Rp 1.009.922.846,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.009.922.846,- dan Rp 852.924.388,-.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung	615.905.500	481.349.000	27,95
Beban Pemeliharaan Peralat	386.672.846	358.088.388	7,98
Beban persediaan bahan un	7.344.500	13.487.000	
Beban Aset Ekstrakomtabel	0	0	#DIV/0!
Jumlah	1.009.922.846	852.924.388	18,41

Beban Perjalanan D.6 Beban Perjalanan Dinas

Dinas

Rp

5.236.891.360,-

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 5.236.891.360,- dan Rp 3.730.634.986,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	4.867.222.838	3.510.479.986	38,65
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	140.037.522	149.095.000	-6,07
Pengembalian Beban Perjalanan Bias	0	0	#DIV/0!
Meeting Dalam Kota	87.205.000	10.525.000	728,55
Meeting Luar Kota	142.426.000	60.535.000	135,28
Jumlah	5.236.891.360	3.730.634.986	40,38

Beban Barang

untuk Diserahkan

kepada

Masyarakat

Rp. 0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa

kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Beban Persediaan Pita Cukai, Materai dan leges	0	0	#DIV/0!
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Beban Bantuan
Sosial Rp 0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 adalah masing masing sebesar Rp 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Untuk Rehabilitasi Sosial			#DIV/0!
Untuk Jaminan Sosial			#DIV/0!
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial			#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

Beban Penyusutan D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

dan Amortisasi

Rp

2.400.335.392,-.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk TA 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 2.400.335.392,- dan Rp 2.367.070.420,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.253.038.882	1.251.615.230	0,11
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	964.139.605	918.064.580	5,02
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan	183.156.905	183.156.905	-
Jumlah Penyusutan	2.400.335.392	2.352.836.715	2,02
Beban Amortisasi Software		3.609.795	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	10.623.910	(100)
Jumlah Amortisasi	-	14.233.705	(100,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.400.335.392	2.367.070.420	1,41

Beban Penyisihan D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu

periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk TA 2023 dan TA 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA
2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar			#DIV/0!
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal BLU	0	0	#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp. 0*

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari

Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
pendapatan penjualan peralatan dan mesin	0	0	#DIV/0!
pendapatan pelepasan Aset Non	0	0	-
Pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	0	
Kerugian Persediaan	0	0	
Defisit Selisih Kurs	0	0	#DIV/0!
Penerimaan kembali belanja peg	0	0	
Pendapatan Penyesuaian Nilai P	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non O	0	0	
Beban Kerugian Pelepasan Aset	0	0	
Beban Penyesuaian Nilai Persed	0	0	

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO)*

*Defisit Pos Luar
Biasa Rp 0*

D.12 Defisit Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa TA 2023 dan 2022

URAIAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB			#DIV/0!
Dinas			#DIV/0!
Beban Persediaan			#DIV/0!
Jumlah	0	0	#DIV/0!

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

E.1 Ekuitas Awal

Rp 55.917.876.640,- Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 55.917.876.640,- dan Rp 56.456.875.928.

Defisit LO

E.2 Surplus (Defisit) LO

Rp (16.497.592.275) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp (16.497.592.275) dan Rp (15.007.227.289). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp 0.

Rp 0

Penyesuaian Nilai Aset

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Rp 0

*Koreksi Nilai
Persediaan
Rp 0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp 0*

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp (231.588.653)*

E.3.5 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (231.588.653),- dan Rp (18.515.023),-.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Tanah	
Peralatan dan Mesin	Rp 231.588.653
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	231.588.653

Koreksi Lain-lain
Rp 0

E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0 . Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp. 19.029.978.606,-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 19.029.978.606,- dan Rp 14.486.743.024,. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	5.411.333.679
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.550.271.813
Transfer Masuk	1.172.510.472
Transfer Keluar	281.470.000
Pengesahan Hibah Langsung	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Rev	231.588.653
Pengesahan Pengembalian Hibah	-
Jumlah	19.029.978.606

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 0, sedangkan DKEL sebesar Rp 0,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 1.172.510.472,- terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	peralatan dan mesin	Direktorat Jenderal Imigrasi	396.381.030
2	lisensi	Direktorat Jenderal Imigrasi	377.783
3	akumulasi penyusutan peralatan dan	Direktorat Jenderal Imigrasi	(29.850.258)
4	akumulasi penyusutan lisensi	Direktorat Jenderal Imigrasi	(377.783)
5	Barang Konsumsi	Direktorat Jenderal Imigrasi	805.979.700
6			
	Jumlah		1.172.510.472

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 281.470.000, terdiri dari :

entitas penerima	Nilai
Kanwil Kemenkumham (667772)	281.470.000
Kanwil Kemenkumham (667772)	-
	281.470.000

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0 dari total Rp 0 yang diterima sepanjang tahun 2022.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp 0.

Rincian Pengesahan Hibah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

No	Penerima Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	NIHIL		
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir **E.5 Ekuitas Akhir**
Rp. 58.218.674.318,-

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 58.218.674.318,- dan Rp 55.917.876.640,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

- Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor :M.HH-04.KP.03.03 TAHUN 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 02 Maret 2022 yang semula PPK : Pallawaruka menjadi PPK Baru : Victor Manurung.
- Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2022 :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : TAUFIQURRAKHMAN, S.Sos., SH., MSi
 - Pejabat Pembuat Komitmen : VICTOR MANURUNG
 - Bendahara : Ananias Tuwiyono Lefteuw
 - Pejabat Penandatanganan PPSPM : Piet Bukorsyom
 Pejabat Pengelola Keuangan Tahun 2023 :
 - Kuasa Pengguna Anggaran : TAUFIQURRAKHMAN, S.Sos., SH., MSi
 Pada Tanggal 13 Maret 2024 Pergantian Kuasa Pengguna Anggaran menjadi Piet Bukorsyom
 Pada Bulan Oktober 2023 terdapat pergantiaan Bendahara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat yang berdasarkan SK Bendahara W.31.640.U.03.03 Tahun 2023 Tanggal 23 September 2023 menjadi :
 - Bendahara : Daud Imanuel Naa

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada Bulan September 2023 terdapat Transfer Peralatan dan Mesin dari Direktorat Jenderal Imigrasi ke Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berupa PC Sebanyak 7 Unit dan UPS 7 Unit dan pada 31 Desember 2023 Bagian Aset dan BMN telah melakukan Transfer Keluar hasil Dropingan Barang tersebut ke Aset Sekjen .

2. Selama periode tahun 2023 terdapat jurnal manual/penyesuaian yang dilakukan dan data jurnal tersebut terlampi memo jurnal penyesuaian dalam laporan ini.

3. Koreksi nilai aset tetap nonrevaluasi pada Kanim Kelas II TPI Sorong merupakan penyusutan transaksional dikarenakan adanya kesalahan penghapusan 1 unit rumah dinas type D Permanen yang kemudian dilakukan pencatatan saldo awal pada periode Desember 2023 atas aset/rumah dinas perolehan tahun 1977 sehingga secara sistem melakukan perhitungan penyusutan transaksional yang menyebabkan adanya koreksi aset non revaluasi.

4. Adapun pendapatan diterima di muka pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong pada periode Tahun 2023 adalah permohonan paspor yang sudah dilakukan pembayaran oleh pemohon, diberikan layanan pada akhir Desember 2023 namun paspornya baru dicetak dan diserahkan pada Januari 2024.

5. Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 Pada Kanim Kelas II TPI Sorong adalah masing-masing sebesar Rp. 1.197.602.280,- dan Rp. 656.145.028,-. Belanja modal pada Tahun Anggaran 2023 merupakan belanja peralatan dan mesin untuk menunjang pelayanan dan pelaksanaan tugas perkantoran sehari-hari, belanja barang tersebut antara lain:

1. 10 unit tabung pemadam
2. 12 pcs kursi besi/metal
3. 1 unit kursi dorong (sudah dilakukan reklas menjadi kursi besi/metal)
4. 1 unit kursi roda
5. 2 unit AC split
6. 5 unit power supply
7. 2 unit scanner

Selain belanja peralatan dan mesin terdapat renovasi 2 unit rumah dinas tipe D permanen dan penyelesaian pagar rumah dinas kepala kantor.

6. Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 2023 mengalami kenaikan dibandingkan TA 2022 dikarenakan pada 2022 masih dalam masa pemulihan ekonomi dan tahun 2023 ini sudah mulai berjalan seperti biasanya dan permohonan penerbitan paspor semakin bertambah baik untuk berwisata, melakukan pengobatan, ibadah, dan lainnya. Adapun untuk pendapatan lainnya adalah pendapatan sewa rumah dinas dengan tarif sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021.

Adapun penjelasan masing-masing pendapatan pada Kanim Kelas II TPI Sorong tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan atas pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp. 510.000 yaitu lelang atas penghapusan barang-barang bongkaran dari hasil renovasi kantor dan rumah dinas yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran yang Lalu namun lelang baru dilakukan pada awal tahun 2023;
- b. Pendapatan denda merupakan pendapatan dari pengenaan denda kepada pelaksana konstruksi atas pelaksanaan renovasi 2 unit rumah dinas type D dan pembangunan pagar rumah dinas Kepala Kantor;
- c. Pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan merupakan pembayaran sewa rumah dinas pegawai yang menempati rumah dinas;
- d. Pendapatan belanja TAYL merupakan pengembalian belanja yang tidak sesuai pada Tahun 2023 atas temuan Itjen berupa belanja bahan yaitu pembelian karangan bunga dan belanja penambah daya tahan tubuh, dan belanja pelaksanaan perjalanan dinas;
- e. Pendapatan atas layanan keimigrasian yaitu pendapatan atas paspor, ijin tinggal keimigrasian, visa, dan pelayanan keimigrasian lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi imigrasi;

